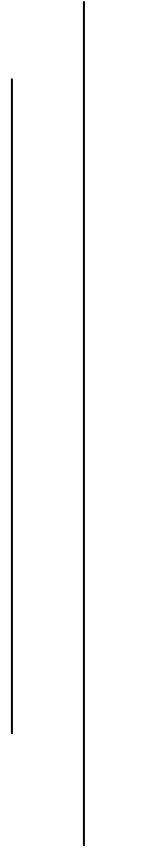


TANTANGAN DAN ANCAMAN TERHADAP HINDU BALI.



Oleh

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali

Disampaikan pada Acara Penataran Pemangku dan Sрати Pasemetonan Pratisentana Sira Arya
Kubontubuh- Kutawaringin, Redite, 21 Maret 2021, di Pura Dalem Tegal Tugu, Desa Adat
Gelgel, Klungkung.

MURDHA CITTA

Om Swastiastu,

Om Awignamastu,

Saya adalah manusia yang mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan dalam pikiran. Kelemahan dan kekurangan dalam perkataan. Kelemahan dan kekurangan dalam perbuatan.

Namun

Walau saya menyadari dengan segala kelemahan dan kekurangan saya, saya terus berusaha dan berupaya untuk meyadnyakan pikiran saya, meyadnyakan tutur kata, meyadnyakan perbuatan dan segala apa yang ada pada diri saya. Saya harus melakukan segala apa yang menjadi kewajiban saya.

Semua itu

Demi Agama Hindu, demi kerukunan dan persatuan umat Hindu dan demi Bali yang Ajeg.

Tan hana wang swasti anulus

Segala kesalahan saya mohon dimaafkan.

Om Ano Bhadrah Kratawo Yantu Wiswatah.

Om Shanti Shanti Shanti Om .

Hormat saya,

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

BEBERAPA PATITIS HIDUP IDA PENGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKEHET

"Kebahagiaan saya tiada lain adalah apabila saya berhasil membahagiakan orang-orang yang saya sayangi, apabila saya merasa dibutuhkan, dibutuhkan oleh semakin banyak orang, apabila dibutuhkan oleh kehidupan ini."

"Ketika kita hidup dengan idealisme, hidup dengan prinsip-prinsip yang kuat, idealisme kebenaran sekalipun, kita memang akan meraih cinta dan kasih sayang dari jauh lebih banyak orang, namun tetap tidak mungkin menghindar dari kebencian beberapa orang."

"Keinginan saya adalah Selagi hidup dibutuhkan, dicintai, disayangi oleh jauh lebih banyak orang, setelah meninggalkan dunia ini, sering dikenang oleh jauh lebih banyak orang...."

"Saya bertekad untuk menjadi orang baik, namun tidak pernah punya keinginan untuk menjadi terbaik. Keinginan saya semoga: sebanyak-banyaknya orang menjadi lebih baik dari saya.

Sebanyak-banyaknya orang lebih sejahtera dari saya.

Sebanyak-banyaknya orang lebih sehat dari saya.

Sebanyak-banyaknya orang lebih cerdas daripada saya.

Sebanyak-banyaknya orang lebih bijak daripada saya.

Sebanyak-banyaknya orang lebih bahagia dari saya.

Saya tidak ingin untuk menjadi juara dalam hal apa pun...."

Bagi saya, jauh lebih baik menolong daripada ditolong, jauh lebih baik memberi daripada diberi, jauh lebih baik dipinjami daripada meminjam, jauh lebih baik mengasihani daripada dikasihani, jauh lebih baik ditipu daripada menipu, jauh lebih baik kecurian daripada mencuri.

Mengasihi, menyayangi sesama umat manusia adalah suatu keindahan yang sangat indah.

"Apa pun kata orang tentang hidup dan kehidupan ini Saya selalu bersyukur, menikmati, dan sangat berterimakasih untuk hidup dan kehidupan ini.... Saya tiada pernah mengeluhkan apalagi menyesali hidup dan kehidupan ini...."

"Saya selalu berusaha dan bekerja, karena itu adalah kewajiban saya yang utama.... Menyembah dan berdoa juga adalah kewajiban saya Namun saya tidak merasa punya hak, kecuali berusaha Sedangkan hasil dari setiap usaha saya bukanlah hak saya.... Segala hasil usaha, hasil setiap kerja itu adalah anugerah dari hyang widhi wasa."

DAFTAR ISI

MURDHA CITTA	I
BEBERAPA PATITIS HIDUP IDA PENGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET	II
1. APA ITU HINDU BALI	1
2. UPACARA	8
3. KEUNTUNGAN SOSIAL UPACARA HINDU BALI	16
4. SULINGGIH HINDU BALI	17
5. HINDU ITU BERBHINEKA	24
6. DESA DATA BENTENG PERTAMA DAN TERAKHIR BALI	25
7. MENGAPA DESA ADAT ITU KUAT DAN SANGAT BERPENGARUH	25
8. ANCAMAN SAMPRADAYA ASING	26
9. NEGARA KESATUAN, PANCASILA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA	30
10. MASALAH MASALAH BESAR YANG DIHADAPI BALI	31

APA ITU HINDU BALI?

Mengapa istilah atau nama *Hindu Bali* perlu dipergunakan kembali oleh para pemeluknya?

Ada dua alasan mendasar, mengapa pertanyaan ini perlu mendapat penjelasan yang tuntas. *Pertama*, ada sebaran isu yang “memprovokasi” Hindu di Indonesia bahwa penganut Hindu Bali (selain Hindu Kaharingan) supaya “*back to Weda*”, kembali kepada ajaran Weda sebagai kitab suci Hindu. Isu ini telah memvonis bahwa Hindu Bali itu seolah-olah tidak berdasarkan Weda. Karena divonis seolah-olah tidak berdasarkan Weda, maka perlu dijelaskan dan ditegaskan kembali bahwa seluruh ajaran *tatwa* (filsafat, hakikat Ketuhanan), etika (susila), dan upacara yang dianut oleh Hindu Bali ini bersumber dari kitab suci Weda.

Kedua, mengingat belakangan ini mulai dikembangkan lagi sekte-sekte Hindu lain yang berasal dari India ke Indonesia, termasuk coba dikembangkan pula di Bali. Guna mencegah terjadinya kekaburan, bahkan kekacauan *tatwa* yang menjadi landasan *srada* (keyakinan), kesimpangsiuran etika (susila), terlebih-lebih tempat ibadah dan upacara *yadnya*, maka dipandang sangat perlu identitas Hindu Bali ini dimunculkan kembali. Dahulu, semasa Mpu Kuturan (awal abad ke-11) sampai kira-kira pertengahan dasawarsa 1990-an identitas Hindu maupun Hindu Bali itu sama saja, karena memang hanya ada satu macam Hindu di Indonesia, lebih-lebih lagi di Bali.

Penataan Hindu Bali secara terlembaga, terstruktur, dan tersistem kiranya bisa dicatat mulai pada abad ke-10. Saat itu Bali Pulina sebagai satu kerajaan yang otonom dipimpin oleh Raja Udayana. Pada saat kepemimpinan Raja Udayana inilah kehidupan beragama di Bali ditata secara melembaga, terstruktur, dan tersistem sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke tingkat keluarga.

Sebelum masa pemerintahan Raja Udayana, kehidupan keagamaan di Bali dicatat dalam manuskrip-manuskrip mirip dengan suasana keagamaan di India yang terdiri dari sekte-sekte. Tercatat ada paling sedikit sembilan sekte utama berkembang di Bali, masing-masing: Sekte Bhairawa, Sekte Boddha Sogata, Sekte Brahma, Sekte Ganapati, Sekte Pasupati, Sekte Waisnawa, Sekte Rsi, Sekte Sora, dan Sekte Siwa Sidhanta.

Disebut-sebut dengan adanya sembilan sekte tersebut menyebabkan suasana keagamaan di Bali menjadi tidak harmonis, kacau, sehingga sangat berpengaruh terhadap *ke-rajeg-an* Bali pada masa itu. Oleh Raja Udayana lantas didatangkanlah seorang *sulinggih* bernama Mpu Kuturan dari Jawa ke Bali. Mpu Kuturan diangkat menjadi Penasihat Raja, salah satu tugasnya adalah membenahi kehidupan keagamaan yang kacau tersebut.

Atas prakarsa Mpu Kuturan sebagai Senapati Kuturan dalam *pakiran-kiran i jro makabehan* (Majelis Permusyawaratan Kerajaan pada masa Kerajaan Bali Kuno) kesembilan sekte tersebut kemudian diundang mengadakan *pasamuhan* (setingkat musyawarah besar) di Badahulu, Gianyar. Lokasi *pasamuhan* tersebut kemudian dinamakan Pasamuhan Tiga—didirikan Pura Kahyangan Jagat bernama Pura Pasamuhan Tiga.

Hasil terpenting dan monumental dari *pasamuhan* tersebut adalah bahwa kesembilan sekte Hindu di Bali tersebut melebur diri ke dalam tiga paham yang menyatu, yaitu Siwa, Boddha, dan Waisnawa. Tri Tunggal paham ini kemudian memuja Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa (Iswara) serta memuja pula seluruh Ista Dewata. Sejak penyatuan di Samuhan Tiga itulah disebut-sebut Bali menjadi damai dan sejahtera. Sejak itu pula pemujaan dalam upacara-upacara besar keagamaan Hindu di Bali di-*puput* oleh *sulinggih* dari tiga paham (*gegelaran*), yaitu *sulinggih* Siwa, *sulinggih* Boddha, dan *sulinggih* Bujangga Waisnawa. Secara tradisi di Bali ketiga *gegelaran sulinggih* ini dinamakan *Tri Sadaka*.

Dengan demikian kesembilan sekte yang melebur diri menjadi Tri Tunggal dengan *gegelaran sulinggih* yang dinamakan *Tri Sadaka* inilah kemudian menjadi ciri utama Hindu Bali. Pada era ini pula Bali kedatangan para *sulinggih* yang juga turut menyempurnakan praktik keagamaan Hindu Bali, antara lain, Mpu Geni Jaya, Mpu Sumeru, Mpu Ghana. Bahkan juga Mpu Baradah.

Tidak berhenti sampai di sini saja. Sekitar empat abad kemudian, semasa pemerintahan Raja Bali Dalem Waturenggong di Gelgel, datang pula Mpu Nirartha dari Jawa ke Bali. Kemudian Mpu Nirartha dikenal dengan nama Danghyang Nirartha atau Ida Pedanda Sakti Wawu Rauh. Beliau selanjutnya memantapkan keberagaman Hindu Bali dari sisi Siwa Sidhanta. Adapun dalam hal upacara dan *bebantenan*-nya dimantapkan oleh Mpu Lutuk, sedangkan *indik* tata ke-*pamangku-an* dimantapkan oleh Mpu Sangkul Putih.

Dengan demikian Hindu Bali dapat diberikan batasan sebagai agama Hindu yang hidup dan berkembang di mana saja, yang inti ajarannya adalah Tantra Siwa Siddhanta yang dimantapkan oleh unsur Boddha dan Waisnawa yang menyembah Hyang Widhi beserta seluruh Ista Dewata, dan terdapat kekhususan sebagai ciri keagamaannya.

Apakah ciri utama keagamaan Hindu Bali itu? Guna mengenal Hindu Bali lebih jelas, terlebih dahulu perlu mengenal ciri-ciri pokok identitasnya, antara lain, sebagai berikut.

1. *Sradha* (Keyakinan) Hindu Bali

Sradha (keyakinan) Hindu Bali didasari oleh *pancasrada*, yaitu:

1. *Sradha* tentang adanya Brahman dan Atman.
 - a. Brahman adalah Sang Hyang Widhi atau Tuhan Yang Mahaesa beserta seluruh Ista Dewata dan Avatara-Nya.
 - b. Atman adalah yang menjiwai segenap mahluk, yang berasal dari Brahman.
2. *Sradha* tentang adanya Kitab Suci dan para Rsi (tokoh suci).
3. *Sradha* tentang adanya Karmaphala sebagai hukum alam yang menggerakkan segenap mahluk hidup.
4. *Sradha* tentang adanya Samsara (Punarbhawa).
5. *Sradha* tentang adanya Moksa, yakni bersatunya Atman dengan Brahman.

2. Dasar Ajaran Hindu Bali

- 1). Weda
 - a). Weda Sruti: Catur Weda (*Rg, Yayur, Sama, dan Atharwa Weda*) dan *Bhagawadgita*.
 - b). Weda Smerti: *Manawa Dharma Sastra* dan *Sarasamusccaya*.
- 2). Upanisad-Upanisad.
- 3). Purana-Purana.
- 4). Itihasa: *Ramayana* dan *Mahabharata*.
- 5). Lontar-lontar Hindu Bali: banyak jumlahnya.

Upanisad, Purana, Itihasa, lontar-lontar Hindu Bali itu bersumber dan/atau merupakan penjabaran dari Weda. Buku *Upadesa* yang disusun pada tahun 1967 oleh tim tujuh (Dr. Ida Bagus Made Mantra; Ida Pedanda Gede Wayan Sidemen; Ida Bagus

Gede Dosther, S.H; Drs. Ida Bagus Oka Punia Atmaja; Tjokorda Rai Sudharta, MA; Ida Pedanda Gede Putra Telaga; I Nyoman Mereta) merupakan identifikasi ajaran Hindu Bali yang bersumber dari Weda, Upanisad, Purana, Itihasa, dan Lontar-lontar Hindu Bali.

3. **Yadnya Hindu Bali**

Yadnya utama Hindu Bali adalah *pancayadnya*, yang meliputi:

1. *Dewa Yadnya*.
2. *Rsi Yadnya*.
3. *Pitra Yadnya*.
4. *Manusa Yadnya*.
5. *Bhuta Yadnya*.

4. **Upacara Hindu Bali**

Upacara keagamaan Hindu Bali meliputi:

1. Upacara *Dewa Yadnya*: upacara persembahan kepada Sang Hyang Widhi beserta segenap Ista Dewata-Nya.
2. Upacara *Rsi Yadnya*: upacara persembahan kepada orang-orang suci atau yang disucikan.
3. Upacara *Pitra Yadnya*: upacara persembahan kepada orangtua atau leluhur, *mendem* (mengubur jasad), ngaben, dan sebagainya.
4. Upacara *Manusa Yadnya*: upacara kepada sesama manusia, seperti upacara daur pertumbuhan hidup manusia: *kepus pungsed*, *abulan pitung dina*, *telu bulanan*, *otonan*, *menek kelih* (*ngaraja singa/ngaraja sewala*), *matatah/mapandes* (potong gigi), sampai pawiwahan.
5. Upacara *Bhuta Yadnya*: pengembalian kepada alam semesta, seperti *segehan*, *caru*, sampai *tawur*.

5. Tempat Suci Hindu Bali

Tempat suci Hindu Bali dinamakan Pura. Ada beberapa jenis pura, antara lain, sebagai berikut.

1. Pura Kahyangan:

a. Kahyangan Jagat:

- Sad/Sat Kahyangan: stana Istadewata (manifestasi) utama Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang meliputi empat arah utama (*dik*) masing-masing Pura Luhur Lempuyang (Isvara) di arah timur (*purwa*), Pura Andakasa (Brahma) di arah selatan (*daksina*), Pura Watukaru (Mahadewa) di arah barat, Pura Batur (Wisnu) di arah utara (*uttara*), serta empat pura lagi di arah silang/sudut (*widik*), masing-masing Pura Goa Lawah (Maheswara) di arah tenggara (*gneya*), Pura Luhur Uluwatu (Rudra) di arah barat daya (*nriti*), Pura Pucak Mangu (Sangkara) di arah barat laut (*wayabya*), dan Pura Besakih (Sambhu) di arah timur laut (*ersanya*). Adapun yang di titik pusat/tengah adalah Padma Tiga di Pura Penataran Agung Besakih.
- Dang Kahyangan, selain merupakan stana Ida Sang Hyang Widhi Wasa, juga untuk memuliakan dan menghormati jasa-jasa tokoh/orang suci yang membangun dan mengembangkan Hindu Bali, seperti Pura Silayukti di Teluk Padang, Pura Rambut Siwi di Jembrana, Pura Segara Rupek di tengah-tengah kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNNB), Gerokgak, Buleleng, dan lain-lainnya.
- Pura Jagatnata, yang dibangun di pusat-pusat wilayah ibukota, seperti Pura Jagatnatha yang ada di tengah Kota Denpasar, di tengah kota Negara, di tengah kota Singaraja, dan lain-lain.
- Kahyangan Jagat lainnya.

- b. Kahyangan Desa, yang berupa Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) atau Kahyangan Desa lainnya.
- c. Pura Prajapati sebagai *pangulun* (hulu atau kepala) *Setra*, sejenis kuburan.
- d. Pura Swagina: Pura Ulun Suwi, Pura Melanting, Pura Segara.

2. Pura Keluarga:
 - a. Pura Padarman ataupun Pura Dadya.
 - b. Sanggah Kamulan untuk masing-masing pekarangan rumah.

Tempat suci Hindu Bali yang dinamakan pura ini, baik Pura Kahyangan maupun Pura Keluarga, masing-masing mempunyai ciri-ciri berupa *palinggih-palinggih* (bangunan suci) khusus yang mencirikan Hindu Bali.

6. Sembah Hindu Bali

Sembah Hindu Bali mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Menyembah Tuhan atau Brahman atau Paramasiwa atau Sang Hyang Widhi, baik yang bersifat Tidak Berwujud (*Nirguna*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *impersonal God*) maupun yang bersifat Berwujud (*Saguna*, dalam bahasa Inggris diistilahkan *personal God*) atau Ista Dewata.
2. Menyembah para rsi atau orang suci yang berjasa mengajarkan kebenaran atau agama.
3. Menyembah *Pitara* atau Leluhur.
4. Menyembah orangtua (ayah dan ibu).
5. Hormat (bukan sembah) kepada para *bhuta*, kekuatan-kekuatan astral alam semesta.

7. Hari Raya Hindu Bali

Hari raya Hindu Bali ada dua jenis, yakni:

1. Hari raya yang berdasarkan bulan (*sasih*) bersiklus setahun sekali, seperti Hari Raya Nyepi dan Siwaratri.
2. Hari raya yang berdasarkan *pawukon* (pertemuan siklus lima harian [*pancawara*] dengan tujuh harian [*saptawara*]), jatuh setiap 210 hari (= enam bulan *pawukon*) sekali, seperti Hari Saraswati, Pagerwesi, Banyupinaruh, Galungan, Kuningan, Tumpek.

8. Penentuan Hari Baik

Penganut Hindu Bali sangat percaya pada penentuan hari baik (*subha dewasa*) dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan upacara *yadnya*. Penentuan hari baik ini disebut dengan istilah *ala ayuning dewasa*—secara harfiah berarti buruk (*ala*) dan baik (*ayu*) hari. Penentuan hari baik ini didasarkan pada gerak, perputaran, dan posisi benda-benda bersinar di angkasa atau planet-planet. Perhitungan *dewasa ayu* atau hari baik ini disebut perhitungan *Wariga Dewasa* yang perhitungannya dilihat dari *Wewaran*, *Wuku* (pekan), *Sasih* (Bulan), *Pananggal* (paruh gelap, menuju bulan gelap/*Tilem*) atau *Panglong* (paruh terang, menuju bulan terang/*Purnama*), dan *Dauh* (rentang waktu).

Penentuan *dewasa ayu* pawiwahan atau perkawinan, misalnya, diyakini menentukan apakah keluarga yang dibentuk kelak akan berbahagia, sengsara, sakit-sakitan, panjang umur, banyak rezeki, rukun, kuat, dan langgen, atau malah sebaliknya, akan cepat bercerai, bahkan cepat menduda atau menjanda. Oleh karena itu penganut Hindu Bali tidak pernah main-main dengan *ala-ayuning dewasa*.

Demikian pula dengan upacara-upacara *yadnya* lainnya, seperti *ngaben/palebon*, *mamukur* yang termasuk *pitra yadnya*. Terlebih-lebih lagi yang berkaitan dengan upacara *dewa yadnya* maupun upacara *butha yadnya*. Bahkan dalam aktivitas kehidupan biasa, seperti membangun rumah, bercocok tanam, mulai berdagang, sampai memulai segala aktivitas, selalu berpedoman kepada *ala ayuning dewasa*.

Ala ayuning dewasa akan sangat berpengaruh pada hasil upacara *yadnya* yang dilaksanakan, apakah akan *siddha karya* (berhasil), *labda karya* (bermanfaat), atau malah *nirdon* (tidak mencapai tujuan, tidak berguna)? *Ala ayuning dewasa* ini juga akan sangat berpengaruh pada setiap hasil pekerjaan. *Padewasan* atau *ala ayuning dewasa*, bagi penganut Hindu Bali, memang diyakini sangat berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan.

9. Bahasa kepada Tuhan

Penganut Hindu Bali mendekatkan diri dan/atau memuja Sang Hyang Widhi dengan tiga macam bahasa, yaitu:

1. bahasa hati atau pikiran yang suci;
2. bahasa perbuatan; yang meliputi (a) perbuatan pada umumnya, dan (b) perbuatan upacara dengan *banten-banten* (sesajen) yang merupakan bahasa simbol-simbol.
3. bahasa kata-kata, yang mencakup mantra dan *puja saa*.

Di depan telah diuraikan bahwa salah satu kitab pegangan ajaran Hindu Bali adalah *Upadesa* yang disusun berdasarkan *Weda*, *Upanisad*, *Purana*, *Itihasa*, dan lontar-lontar Hindu Bali. Di sini tidak lagi dibahas apa itu *Weda*, *Upanisad*, *Purana*, *Itihasa*, atau lontar-lontar Bali, karena sudah cukup banyak buku yang membahas secara mendalam tentang dasar-dasar filsafat agama Hindu Bali tersebut.

Satu hal yang sering dianggap sebagai perbedaan—dan karenanya sering dipertanyakan—adalah bahwa Hindu Bali memuja leluhur (*kawitan*). Selain itu juga kerap dipertanyakan perihal upacara *yadnya* kepada *bhuta* (*bhuta yadnya*). Terkait dengan hal tersebut, berikut ini dikutipkan beberapa sloka *Weda* maupun *Itihasa* yang berhubungan dengan *yadnya* kepada leluhur (*kawitan*) maupun *bhuta yadnya*.

Upacara

Kedudukan dan makna upacara agama dalam Hindu Bali sangat penting, memang. Selain sebagai keyakinan, upacara juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agama Hindu, sehingga dimasukkan ke dalam tiga kerangka agama Hindu. Upacara juga tidak akan pernah memberatkan penganut Hindu Bali, bila syarat-syarat pelaksanaannya dipenuhi. Syarat-syarat upacara supaya mendapatkan makna keutamaan, yaitu:

1. Dilaksanakan atas dasar pikiran suci, dalam arti dilaksanakan dengan tulus ikhlas (*lascarya nekeng tuas*), dengan perasaan senang, bahkan penuh bahagia.
2. Harus sesuai dengan kemampuan (*nista, madya, utama*).

3. Harus dilaksanakan dalam keadaan batin yang tenang dan rahayu.
4. Harus dilaksanakan sesuai dengan *lelutuk banten*, baik dari segi jenis *banten* maupun dari segi besaran upacara (*nista, madya, utama*).
5. Harus memenuhi kelengkapan tatanan upacara, juga sesuai dengan tingkatan upacara *nista, madya, utama*. Kelengkapan bertalian dengan *banten, wali, tetabuhan* (gambelan wali), *pamutruan, kidung*, perlengkapan sarana upacara, *pamuput* upacara, dan prosedur (*eedan*) upacara.

Di antara syarat-syarat tersebut, yang sering menjadi pertanyaan adalah apa batasan kemampuan untuk berupacara? Apa pula makna tingkatan *nista, madya, utama*?

Kemampuan yang dimaksudkan di sini terutama adalah kemampuan pembiayaan (finansial) yang dimiliki oleh penyelenggara upacara, sehingga pembiayaan tersebut tidak dirasakan memberatkan, tidak sulit mendapatkan, dan tidak pula menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalnya, tidak sampai harus menjual tanah, tidak sampai berutang tapi bermasalah dalam pengembaliannya atau bahkan utang-utang upacara itu tidak terbayar. Bilapun mesti berutang, tetap mesti gampang dapat dikembalikan.

Lebih sederhana dapat dikatakan bahwa kemampuan pembiayaan upacara sepatutnya jangan sampai menimbulkan masalah, jangan sampai menimbulkan keluhan, jangan sampai menimbulkan pertengkaran, dan juga jangan sampai memberatkan keluarga ataupun *krama* (warga) desa. Biaya upacara tetap harus dikeluarkan dengan tulus ikhlas, senang, dan bahkan bahagia.

Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan tingkatan *nista-madya-utama* adalah pilihan yang dipilih secara bebas berkenaan dengan tingkatan besar kecilnya upacara. Keseluruhan tingkatan itu ada sembilan, mulai dari tingkatan paling sederhana: (1) *nistaning nista*, (2) *madyaning nista*, (3) *utamaning nista*; lalu tingkatan sedang/menengah: (4) *nistaning madya*, (5) *madyaning madya*, (6) *utamaning madya*; sampai pada tingkatan besar/megah: (7) *nistaning utama*, (8) *madyaning utama*; dan yang terbesar adalah (9) *utamaning utama*.

Nistaning nista adalah bentuk upacara paling kecil (inti), paling ekonomis, murah, dan karenanya tentu sangat praktis, sangat mudah mempersiapkan dan menyelenggarakannya. Sedangkan *utamaning utama* adalah bentuk upacara terbesar (megah), sehingga pasti

membutuhkan biaya besar, tentunya juga memerlukan proses persiapan dan penyelenggaraan yang cukup lama.

Nista-madya-utama dalam kaitan dengan besar-kecil upacara disebut tingkatan kuantitatif. Sedangkan *nista-madya-utama* dalam kaitan tingkatan makna upacara (ukurannya: seberapa tingkat keberhasilannya) disebut tingkatan kualitatif.

Atas dasar tingkatan kuantitatif dan kualitatif tersebut, maka bisa saja upacara yang tingkatan kuantitasnya *nista* namun tingkatan kualitas (*kasuksman*)-nya justru *utama*. Ini bisa terjadi karena tingkatan kuantitas yang *nista* itu justru didukung sepenuhnya dengan pemenuhan syarat-syarat keutamaan upacara, sebagaimana telah dikemukakan tadi. Demikian juga sebaliknya, walaupun upacara diselenggarakan dengan mengambil tingkatan kuantitas yang *utama*, namun hasilnya justru *nista*, atau bahkan menjadi *nirdon* (tidak bermakna sama sekali), karena tidak memenuhi syarat-syarat keutamaan upacara, dan juga banyak cacatnya.

Sudah tentu yang terbaik adalah pengambilan tingkatan upacara dengan kuantitas *utamaning utama* yang sekaligus diikuti sepenuhnya dengan pemenuhan syarat-syarat keutamaan upacara. Hasil upacara sekelas ini sudah tentu pula sangat *utama* (tertinggi), *utamaning utama*, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (*kasuksman*).

Jadi, syarat kemampuan (finansial) dan syarat ketulus-ikhlasan dalam memilih tingkatan *nista-madya-utama* suatu upacara itu merupakan unsur yang sangat penting untuk memperoleh hasil yang utama secara kualitas. Kemampuan (finansial) dan ketulus-ikhlasan secara konkret dapat diilustrasikan sebagai berikut.

- Ada kewajiban upacara yang penyelenggaranya tergolong mampu (kaya). Upacara ini sepatutnya membutuhkan tingkatan kuantitas *utama*, namun karena alasan ingin ekonomis, praktis, dan cepat, lantas orang mampu (kaya) ini justru memutuskan memilih tingkatan *nista*. Hasilnya dapat dikategorikan menjadi *nista*, karena terdapat unsur kikir atau loba dalam penentuan upacara tersebut.
- Ada kewajiban upacara yang sepatutnya diselenggarakan dalam tingkatan *utama*. Misalnya, *karya* ini sudah 100 tahun lebih tidak pernah dilaksanakan. Tetapi yang punya kewajiban menyelenggarakan upacara ini memang benar dari kelompok tidak mampu. Si penyelenggara ini dengan penuh ikhlas lantas memilih tingkatan *nistaning madya*.

Syarat-syarat keutamaan upacara dipenuhi nyaris sempurna. Hasil atau *kasuksman* upacara ini adalah *utama*—karena diselenggarakan dengan jujur, tulus ikhlas, tanpa mengada-ada.

- Ada kewajiban upacara yang sepatutnya diselenggarakan dalam tingkatan *utama*, tetapi yang punya kewajiban sungguh-sungguh tidak mampu. Meskipun demikian, si penyelenggara memaksakan diri tetap mengambil tingkatan *utama*. Ia lantas menjual tanah warisan. Tidak cukup juga. Ia pun berutang lagi, meskipun tidak mungkin terbayar. Masih tidak cukup juga. Akhirnya si penyelenggara upacara ini mengumpulkan dana yang menimbulkan kegaduhan. Upacara ini secara kasat mata memang terlihat utama, namun *kasuksman* atau hasilnya justru menjadi *nistaning nista*, bahkan justru *nirdon* (tidak bermakna sama sekali) karena menimbulkan kegaduhan dan mewariskan masa depan suram bagi keluarganya.

Ilustrasi tersebut menunjukkan jelas bahwa makna (*kasuksman*) *yadnya* atau upacara tidaklah semata-mata ditentukan oleh sekadar pemilihan *nista-madya-utama* secara kuantitas, melainkan mutlak ditentukan oleh lima syarat keutamaan upacara. Dengan adanya sembilan kelompok tingkat besar-kecil (kuantitas) *yadnya* atau upacara, sepatutnya tidak ada lagi wacana penyederhanaan upacara ataupun pembesaran upacara. Kenapa? Karena tingkatan upacara *nistaning nista* sudah tidak dapat lagi disederhanakan—kecuali memang tidak ada niat melaksanakan upacara. Begitu pula sebaliknya, jangan lagi menambah-nambah *lelutuk* upacara yang sudah tingkat *utamaning utama*.

Hal lain yang dapat ditegaskan adalah bahwa yang kaya/mampu jangan kikir, tidak ikhlas, dan berlagak tidak mampu. Begitu pula sebaliknya, yang memang tidak mampu, bahkan miskin secara ekonomi, jangan boros, memaksakan diri, berlagak mampu atau kaya. Pada saat miskin atau tidak mampu selenggarakanlah upacara tingkatan *nista*. Sebaliknya, pada saat kaya/mampu selenggarakanlah upacara tingkatan *utama*.

Dalam hal menyelenggarakan upacara *yadnya*, kebiasaan-kebiasaan pada saat miskin janganlah diteruskan menjadi kebiasaan pada saat telah menjadi kaya. Demikian juga sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan pada saat kaya jangan pula diteruskan menjadi kebiasaan-kebiasaan pada saat sudah jatuh miskin. Keutamaan *yadnya* atau upacara—bahkan juga

keutamaan hidup—sangat ditentukan oleh seberapa bijaksana kita menyesuaikan pilihan dengan kemampuan.

Kemampuan bukanlah diukur berdasarkan berapa banyak seseorang punya tanah, sawah, atau kebun. Tanah, sawah, tegalan, atau kebun bukanlah kemampuan. Itu semua adalah harta yang dianggap sebagai modal untuk memperoleh kemampuan. Adapun kemampuan haruslah diukur berdasarkan seberapa besar penghasilan seseorang per tahun, per bulan, per minggu, ataupun per hari. Seberapa besar gaji atau upah yang didapat, seberapa besar hasil yang diperoleh dari sawah, tegal, kebun, atau aset-aset yang dimiliki per bulan atau per tahun, itulah kemampuan riil seseorang.

Untuk menentukan keutamaan Yadnya (tingkatan apapun yang dipilih) haruslah berdasarkan:

1. Kepantasan
2. Kemampuan
3. Situasi dan kondisi
4. Ketulus iklasan / Lascarya nekeng tuas
5. Terbebas dari Sad Ripu dan Sapta Timira

Dari penjelasan ini menjadi terjawab jelaslah, betapa upacara bukanlah pemborosan. Upacara yang diselenggarakan oleh penganut Hindu Bali tidak benar menjadi penyebab kemiskinan atau pemiskinan. Sebaliknya, upacara justru bermakna luhur, bernilai tinggi, dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Upacara itu menyejahterakan dan membahagiakan.

Bila kemudian terjadi kasus-kasus pemborosan, atau bahkan menjadi miskin setelah menyelenggarakan upacara, sejatinyalah itu bukan karena upacara. Itu terjadi semata-mata karena salah si manusia yang tidak bijaksana dalam memilih tingkatan upacara, tidak menyesuaikan dengan kemampuan sendiri—malah mengedepankan gengsi pribadi ketimbang *kasuksaman* upacara.

Upacara dan Kesejahteraan

Upacara *yadnya* diselenggarakan dalam pandangan Hindu Bali dengan tujuan agar hidup dan kehidupan ini menjadi lebih rukun, lebih damai, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Melalui upacara *yadnya* penganut Hindu Bali memohon kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan Ista Dewata untuk tujuan-tujuan tersebut. Bila upacara berhasil, dalam arti memenuhi lima syarat keutamaan upacara, maka pastilah Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta seluruh Ista Dewata akan menurunkan anugerah-Nya. Pemaknaan upacara ini merupakan pemaknaan dalam konteks *niskala*, berupa keyakinan.

Adapun makna upacara *yadnya* secara nyata (*sakala*) sebagai sarana atau media kesejahteraan juga akan jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

1. Upacara sebagai alat perputaran ekonomi, terutama perputaran ekonomi antara desa (masyarakat komunal agraris) dan kota (masyarakat industrialis dan kapitalis). Karena upacara-lah perekonomian desa-desa di Bali menjadi hidup atau lebih hidup. Ini terjadi karena semua bahan upacara berasal dari desa dan/atau dari kreativitas masyarakat desa. Belakangan ini upacara keagamaan Hindu Bali bahkan juga telah mendukung perputaran ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa Timur, Lombok, hingga Sulawesi.
2. Upacara sebagai alat pemerataan kesejahteraan sosial. Analoginya hampir sama dengan butir 1 di atas. Masyarakat Bali masih mempertahankan cara kerja gotong-royong, kebersamaan, saling membantu. Setiap upacara besar penganut Hindu Bali akan melibatkan banyak orang, bahkan sampai ribuan orang. Mereka saling membantu, diberikan makanan dan minuman, dan tidak jarang juga mereka diberikan *dana punia* (biasanya penyelenggara upacara yang kaya akan memberi *dana punia* masyarakat yang kurang mampu yang datang membantunya). Itu sebab Penulis katakana bahwa setiap upacara *yadnya* di Bali merupakan salah satu wujud kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Upacara sebagai lapangan kerja. Sebagian besar pepohonan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, hingga buahnya berguna dan dibutuhkan sebagai sarana upacara. Ini menyebabkan para petani di desa lebih giat dan produktif bekerja, karena ada upacara yang menjanjikan, bahwa hasil kerjanya akan ditampung untuk kegiatan upacara

keagamaan. Demikian juga sarana atau alat-alat upacara yang sangat banyak jumlah dan jenisnya itu merupakan barang-barang kerajinan ekonomi yang dikerjakan oleh masyarakat desa. Kerajinan-kerajinan dan alat-alat upacara itu selalu hidup dan bertumbuh di Bali. Ini semua adalah pekerjaan, ini semua adalah lapangan kerja yang bahkan berorientasi ekonomi kerakyatan.

Oleh karena upacara menjadi sarana perputaran ekonomi, merupakan sarana pemerataan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai lapangan pekerjaan, maka itu berarti bahwa upacara sesungguhnya juga menjadi sarana pengentasan kemiskinan di Bali. Dengan demikian akan menjadi sangat naif dan menyedihkan bila masih ada pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa upacara yadnya penganut Hindu Bali itu sebagai pemborosan, atau bahkan dicap sebagai penyebab kemiskinan. Itu jelas pemahaman yang sangat dangkal terhadap makna substansial upacara-upacara Hindu di Bali.

Ada dua pertanyaan mendasar yang kerap muncul berkenaan dengan upacara agama Hindu Bali. Pertama, apa makna tingkatan upacara nista, madya, utama itu? Kedua, benarkah upacara itu merupakan pemborosan atau bahkan penyebab kemiskinan?

Sebelum sampai pada jawaban terhadap kedua pertanyaan tersebut, sangat penting dipahami cara mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Mahaesa oleh penganut Hindu Bali. Pendekatan diri kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dilakukan dengan berbagai cara oleh penganut Hindu Bali.

1. Pendekatan dengan pikiran atau perasaan. Dalam hal ini pikiran dan perasaan yang digunakan adalah pikiran dan perasaan tulus ikhlas seikhlas-ikhlasnya (*lascarya nekeng tuwas*) untuk berbakti kepada-Nya. Pikiran yang tidak pernah mengeluh kepada-Nya, juga tidak pernah memprotes-Nya, dalam keadaan apa pun adanya. Bila memiliki kesulitan, bahkan dalam keadaan mara bahaya sekalipun, penganut Hindu Bali yang tulus ikhlas tidak akan memprotes maupun mengeluh kepada Tuhan, melainkan hanya memohon dan terus memohon agar diberikan jalan dan tuntunan supaya bisa keluar dengan selamat dari kesulitan ataupun marabahaya. Pendekatan dengan jalan pikiran

juga dilakukan dengan tiada henti memanjatkan rasa *angayu bagia* (berterima kasih dan bersyukur) kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

2. Pendekatan dengan perkataan atau ucapan. Yang dimaksudkan di sini adalah perkataan yang baik, bermanfaat untuk hidup dan kehidupan, perkataan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Perkataan yang penuh dengan doa, harapan, dan dorongan untuk kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Jadi yang termasuk pendekatan perkataan atau ucapan di sini adalah pendekatan ucapan dalam bahasa biasa, bahasa sehari-hari, penyebutan Nama-Nama Tuhan, sampai pada dengan puja mantra.
3. Pendekatan dengan nyanyian. Ida Sang Hyang Widhi beserta seluruh Ista Dewata sangat senang dengan keindahan dan nyanyian, karena nyanyian juga mengandung unsur keindahan. Tentu nyanyian yang dimaksudkan di sini adalah nyanyian yang baik dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan, baik syair maupun lagunya. Jenis-jenis nyanyian Hindu Bali, antara lain: nyanyian biasa; kidung, *wirama (kakawin)*, *palawakya*; mantram-mantram (sloka dan sloka suci) yang dinyanyikan dengan *hreng* dan nada *nyloka* yang khusus.
4. Pendekatan dengan upacara. Upacara merupakan pendekatan yang sangat penting dalam Hindu Bali. Tidak mungkin dapat disebut Hindu, lebih-lebih Hindu Bali, bila tanpa pendekatan upacara, mengingat kerangka agama Hindu ada tiga, yaitu *tattwa* (filsafat) yang bersumber dari Weda, susila (etika), dan upacara. Makna upacara dalam kaitan ini mencakup lima tujuan, yakni: (1) memuja Tuhan; (2) bersyukur (*angayu bagia*); (3) berterima kasih (*parama suksma*); (4) memohon tuntunan, memohon berbagai anugerah; dan (5) memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa.
5. Pendekatan dengan perbuatan sosial. Terutama yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan yang berkaitan dengan agama, adat, budaya, kemasyarakatan, dan lingkungan.
6. Pendekatan kerja. Kerja yang diutamakan adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dengan tetap berpijak pada ajaran Karma Yoga, Bakti Yoga, dan Catur Purusa Artha yang mencakup *dharma* (harus tetap sebagai landasan utama kerja), *artha* (dana/kekayaan), *kama* (kebutuhan dan keinginan-keinginan hidup), dan *moksa* (pembebasan hingga

menyatu di alam Tuhan Yang Mahaesa, sehingga mencapai kebahagiaan abadi, *suka tan pawali duka*, dan mengikuti sifat-sifat Tuhan).

7. Pendekatan Tapa, Brata, Yoga, Samadi. *Tapa, brata, yoga, dan samadi* merupakan satu di antara inti-inti agama Hindu. *Tapa, brata, yoga, dan samadi* pada dasarnya merupakan pendekatan yang penuh dengan ujian, tantangan, dan penuh juga dengan pengendalian diri. Karena unsur penting agama Hindu adalah *Tapa, brata, yoga, dan samadi*, maka agama Hindu, terlebih lagi Hindu Bali, memang tidak mudah bahkan terasa sangat berat kalau saat menjalankan ajarannya tidak didasari dengan niat yang sungguh-sungguh. Namun bila ada niat sungguh-sungguh, maka *Tapa, brata, yoga, dan samadi*, tidak akan terasa berat, terlebih lagi bila niat sungguh-sungguh tersebut muncul dari keinginan yang tulus ikhlas, *lascarya nekeng tuas*, maka pendekatan *Tapa, brata, yoga, dan samadi* yang kelihatannya sangat berat akan menjadi sangat ringan, menyenangkan, bahkan membahagiakan. Atas dasar pemahaman itulah, manakala penulis ditanya “apakah Hindu itu rumit dan berat?” jawaban yang penulis berikan selalu berupa penegasan, “bila dilaksanakan dengan niat hati yang tulus ikhlas, *lascarya nekeng tuas*, maka akan menjadi sangat ringan, menyenangkan, dan membahagiakan. Semakin berat tantangan, ujian, atau pengendalian diri yang diambil, manakala lulus, maka kebahagiaan yang didapat pun lebih tinggi, bahkan sampai pada kebahagiaan yang tertinggi dan abadi, moksa, suka tan pawali duka”.

Keuntungan Sosial Upacara Hindu Bali.

1. Karena dalam upacara Hindu Bali akan selalu mempergunakan sarana dari hasil alam semesta seperti : berbagai macam tanaman berserta bagian bagiannya, berbagai macam binatang, baik binatang peliharaan, isi hutan, isi gunung, danau, sungai, laut maka didalam upacara Hindu Bali terkandung pesan yang amat dalam, yaitu jagalah semua isi alam semesta karena kalian pasti membutuhkan untuk hidup dan untuk Upacara. Jadi , didalam Upacara Hindu Bali terkandung perintah agama untuk pelestarian alam.
2. Perputaran Ekonomi/ Kesejahteraan : dari gunung, desa ke kota. Dari petani, peternak, nelayan ke para Kapitalis.

3. Sebagai sarana sosial : melibatkan banyak orang, yang biasanya selalu diberikan makan minum, bahkan pakaian dan danapunia.

Jadi , bohong besar kalau Upacara Hindu Bali disebut sebagai pemborosan, sebagai penyebab kemiskinan. Bahkan ternyata sebaliknya, jika cara memilih tingkatan upacara dilakukan secara benar, maka akan menjadi sarana sosial, sarana pemerataan ekonomi atau kesejahteraan.

SULINGGIH HINDU BALI

1. *Sulinggih* adalah Sang *Dwijati*

Sulinggih atau *pandita* yang dimaksudkan di sini adalah *sulinggih* Hindu Bali dari keturunan mana pun dia, bagi umat Hindu Bali, adalah seorang *Brahmana Dwijati*. Brahmana Dwijati adalah *brahmana* yang tingkat kebrahmanaannya dicapai melalui proses lahir dua kali (*dwijati*). Setelah memenuhi segala persyaratan dan melampaui proses *dwijati* secara Hindu Bali, maka seseorang di-*diksa* (disucimurnikan secara kerohanian atau spiritual) sebagai *sulinggih dwijati*. Itu sebabnya orang yang sudah di-*diksa* disebutkan sebagai lahir yang kedua kali. Pertama kali dia lahir dari rahim sang ibu biologis, sedangkan kelahirannya yang kedua kali ini lahir dari kemampuan, kesadaran, dan pengetahuan kerohanian sang guru *nabe* (guru spiritual). Idealnya seorang *dwijati* lahir kembali sebagai manusia suci, tanpa cacat cela, sehingga manusia suci ini termasuk ke dalam golongan *sulinggih* (orang dengan kedudukan terhormat dan sakral).

Upacara sakral *dwijati* secara Hindu Bali sebenarnya merupakan puncak perjalanan dan pendakian spiritual, dari manusia *walaka* (manusia biasa) yang tidak luput dengan cacat cela, lalu berproses menjadi *sulinggih* yang luput dan *tan keneng* (tidak terkena) cacat cela; dari manusia yang tidak suci berproses menjadi manusia suci. Proses *dwijati* tersebut bukanlah hanya pada upacara *diksa*. Upacara *diksa* itu hanya merupakan puncak proses *dwijati* yang cukup lama. Ibarat proses seseorang meraih gelar sarjana, maka acara wisuda hanyalah puncak seluruh proses selama 4-5 tahun perkuliahan.

Untuk menjadi seorang *sulinggih*, proses pendakian spiritual yang dilalui tentu saja lebih lama dan jauh lebih berat daripada proses menjadi seorang sarjana. Proses tersebut sebenarnya telah dapat diamati sejak masa *brahmacari* (remaja, semasa menuntut pelajaran), berlanjut terutama kemudian pada masa *grehasta* (berumah tangga). Sikap dan perilakunya sudah sepatutnya menunjukkan sikap perilaku seorang *walaka* yang pantas di-*diksa* menjadi *sulinggih*.

Proses *walaka* menjadi seorang sang *dwijati* dari pandangan hukum agama diartikan tidaklah sekadar perubahan dari tidak suci menjadi orang suci. Lebih daripada itu, sosok

(terutama karakter) manusia *walaka*-nya telah dinyatakan tidak ada lagi atau “mati”. Karena *karma wasana* semasa *walaka*-nya telah dinyatakan “mati” (*nyeda raga*) atau tidak ada lagi, maka *sesana* (etika perilaku, tugas pokok dan fungsi) sang *walaka* pun lantas diganti dengan *sesana sang sulinggih*, yaitu *ngaloka pala sraya*.

Guna dapat menjalankan *sesana ngaloka pala sraya*, maka sang *dwijati* pun diikat oleh *brata* pokok. Ada empat *brata* pokok, yang disebut *catur bandana brata*, sang *dwijati*, yakni:

1. *amari aran* : berganti nama;
2. *amari bhusana* : berganti tingkah berbusana;
3. *amari wesa* : berganti tingkah laku;
4. *amari wisaya* : berganti kesenangan, bahkan menuju pembebasan dari ikatan keduniawian.

Dengan proses *amari aran* (kewajiban berganti nama) dan tiga *brata* lainnya itu, maka menjelmalah seorang *walaka* sebagai *sulinggih* yang telah dinyatakan suci, dalam arti *tan keneng patita* sekaligus juga *tan ceda angga*, artinya tanpa cacat cela, baik fisik maupun rohani. Termasuk juga dalam hal ini mesti telah dinyatakan bebas dari masalah-masalah hukum, baik hukum perdata maupun pidana.

Oleh karena itulah seseorang yang telah menjadi *sulinggih* tidak lagi diperbolehkan, atau tidak lagi dipatutkan mengemudikan kendaraan sendiri (menyetir sendiri, menjadi sopir), misalnya. Hal ini penting guna menghindarkan sang *sulinggih* dari kemungkinan-kemungkinan masalah hukum yang sangat pelik atas terjadinya kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan akibat mengemudikan kendaraan itu. Begitu pula, *sulinggih tan wenang adol-atuku* (tidak patut lagi bertransaksi jual-beli). Pantangan ini mempunyai maksud jelas bahwa sang *sulinggih* tidak boleh lagi terikat dengan urusan, apalagi pamerih, keuntungan materiil, di samping juga agar sang *sulinggih* tersebut terbebas dari masalah-masalah hukum, baik perdata maupun pidana, sebagai akibat yang mungkin timbul dari urusan jual-beli tersebut.

Sesana dan syarat-syarat ke-*sulinggih*-an tersebut patut dijalani dan dijalankan dengan *rajeg* (taat dan ketat asas) sesuai dengan *uger-uger kawikon* oleh sang *sulinggih*. Hal ini mutlak karena dari pandangan hukum agama Hindu, seorang *sulinggih* harus selalu dinyatakan jujur oleh *walaka*, harus selalu dinyatakan benar oleh *walaka*. Tidaklah diperbolehkan atau tidaklah dipatutkan seorang *walaka* menyatakan seorang *sulinggih* itu tidak benar, tidak baik, terlebih lagi dinyatakan berbohong. Yang berhak menyatakan seorang *sulinggih* itu tidak benar, tidak baik, atau bahkan berbohong itu hanyalah sang *Nabe* (sang Guru Spiritual). Bila sang *Nabe* telah *lepas* atau *lebar* (wafat), maka penilaian itu dapat dilakukan oleh *Paruman Sulinggih*. Hanya para *sulinggih* itulah yang berhak dan berwenang mem-*patita* (menjatuhkan sanksi) kepada seorang *sulinggih*.

2. *Sulinggih* Tidak Sama dengan Pendeta Umumnya

Tanpa mengurangi rasa hormat dengan para pendeta dari agama selain Hindu Bali, dapatlah dinyatakan di sini bahwa *sulinggih* menurut Hindu Bali memang tidaklah identik dengan *pendeta* pada umumnya, ataupun pemimpin-pemimpin agama pada umumnya. Begitu juga—sebagai ilustrasi lain—konsep *setra* dalam masyarakat Hindu Bali tidaklah identik dengan *kuburan* pada umumnya. Memang mesti diakui bahwa dalam beberapa hal konsep dan filsafat agama Hindu Bali memang berbeda dengan agama lain, walaupun tujuan setiap agama mungkin sama. Logikanya mudah sekali: kalau memang harus sama satu dengan lain, maka tidaklah perlu ada banyak agama. Tuhan telah menciptakan banyak jalan dan banyak cara menuju kepada-Nya.

Begitulah adanya, konsep utuh *sulinggih* dalam Hindu Bali, misalnya, memang berbeda dengan pendeta pada umumnya. *Sulinggih*, sesuai dengan proses *dwijati* yang sakral, bagi penganut Hindu Bali adalah sosok yang sangat mulia, yang tidak terbatas pada dihormati, dimuliakan, dan dipatuhi saja, tetapi juga disucikan. Disucikan di sini diartikan bahwa penganut Hindu Bali wajib menjaga kesucian *sulinggih*-nya, baik *sakala* (jasmani) maupun *niskala* (rahani). Untuk itu penganut Hindu Bali wajib menjaga *sulinggih*-nya agar tidak terkena *leteh* (kekotoran) maupun *ujar ala* (kata-kata kotor: disalahkan, dicaci-maki, diumpat, atau dituduh yang tidak baik).

Untuk maksud dan tujuan tetap menjaga kesucian itulah maka seorang *sulinggih* dalam etika Hindu Bali tidaklah boleh didebat oleh *walaka*. Umat hanya boleh mendengar wacananya serta memohon petunjuk kepada *sulinggih*. Karena kedudukan dan *sesana sulinggih* yang demikian itulah maka beliau tidak dapat dipanggil sebagai saksi dalam masalah hukum pidana ataupun perdata, tidak dapat lagi terlibat dalam gugat-menggugat secara hukum. Apalagi hendak dijadikan tersangka, ini pasti tidak boleh! Untuk menghindarkan dari kemungkinan-kemungkinan itulah maka seorang *sulinggih* diwajibkan superhati-hati, superketat mengontrol diri, mematuhi ketentuan *sesana kawikon*.

Fasilitas yang berhubungan langsung dengan *sulinggih* juga haruslah memenuhi persyaratan kesucian, yaitu *sukla*, dalam arti bersih secara sakala dan niskala. Makanan, minuman, dan tempatnya haruslah *sukla*, memang diperuntukkan khusus untuk beliau. Seorang *sulinggih* tidak boleh dituntun untuk ikut makan di rumah makan, ikut acara makan prasmanan bersama, apalagi hendak diajak *magibung* (makan dengan satu wadah bersama-sama).

Sebagai sang *dwijati*, seorang *sulinggih* memang dipahami oleh penganut Hindu Bali beliau telah lahir kembali dengan lembaran hidup yang betul-betul baru. Segala wujud, status, *sesana* yang telah lalu (semasa *walaka*), serta *karma-karma wasana walaka*-nya secara hukum agama telah dianggap tidak ada lagi atau telah mati. Kini berganti dengan wujud, nama, status, *sesana*, dan karma yang baru.

Oleh karena itulah pada saat *diksa pariksa* (semacam uji kepatutan), sang *diksawan* (calon *diksa*) terlebih dahulu mesti telah dinyatakan dalam status *tan ceda angga* atau terbebas dari cacat cela, termasuk telah terbebas dan/atau bersih dari masalah-masalah hukum, baik perdata ataupun pidana. Pernyataan *tan ceda angga* ini tentu dikeluarkan setelah melalui proses *diksa pariksa* yang dibantu pelaksanaannya oleh tim *diksa pariksa*, kemudian dinyatakan oleh sang Guru Nabe dan sang Guru Waktra bersangkutan sebagai “telah bebas dari cacat cela”.

Selanjutnya, guna menghindari *ujar ala*, seseorang yang sudah di-*dwijati* semestinya juga sudah *maraga putus*: putus dengan pamerih keduniawian, menjaga dan menahan pekataan, tidak mudah berkomentar, tidak lagi aktif sebagai pengamat atau komentator. Berbuat, berkata, menulis dapat dilakukan sang *dwijati* harus bila sudah sangat diperlukan dan dengan sangat hati-hati. Untuk itu sang *dwijati* harus bisa menahan diri supaya tidak mudah berkomentar—terutama di media massa—terhadap masalah-masalah non-keagamaan. Bahkan, pada masalah keagamaan sekalipun, kalau terjadi polemik di media massa, sang *sulinggih* harus mampu menahan diri dulu. Bila sudah mentok, jalan buntu, maka barulah sang *sulinggih* berbicara. Ini penting karena ucapan sang *sulinggih* pada hakikatnya adalah “sabda” yang bersifat final dan mengikat para *walaka*. *Sulinggih* sepatutnya tidak terjebak lagi pada pengejaran popularitas—namun, walaupun akhirnya menjadi populer, itu semata-mata karena popularitas tersebut-lah yang datang dengan sendirinya.

Peran utama sang *sulinggih* adalah *ngaloka pala sraya*—membina dan menuntun umat, serta *muput* (memimpin) upacara. Karena kedudukannya yang sedemikian terhormat itulah maka sang *dwijati* haruslah mendapatkan dukungan dan pengakuan. Dukungan dan pengakuan tersebut merupakan wujud kebutuhan umat. Ini perlu sebagai wujud bahwa sang *wiku dwijati* atau *silinggih* yang bersangkutan memang dibutuhkan oleh masyarakat (umat) untuk menjadi *sulinggih* mereka.

Dukungan pertama-tama diperlukan dari keluarga sendiri dan juga keluarga besar. Tentu akan sangat aneh jadinya apabila ada *sulinggih* yang tidak didukung dan tidak dipakai oleh keluarganya. Setelah dari keluarga sendiri dan keluarga besar, kemudian sang *wiku dwijati* harus pula mendapat dukungan dari desa pakraman atau desa adat tempat beliau tinggal. Bila sudah mendapatkan dukungan dari ketiga pihak ini (keluarga sendiri, keluarga besar, dan desa pakraman), selanjut pengakuan pun sepatutnya juga demikian. Pengakuan terhadap keberadaan dan status seorang *sulinggih* atau *wiku dwijati* juga sangat dibutuhkan baik dari keluarga sendiri, keluarga besar, lalu desa pakraman, dan akhirnya pengakuan dari Parisada.

Kedudukan dan *sesana* sang *dwijati* memang sangat sentral dan strategis dalam tatanan masyarakat Hindu Bali. Beliau sangat dihormati dan dimuliakan sekaligus selalu menjadi fokus perhatian. Kenapa? Karena *sang dwijati* itu, dalam pandangan ideal Hindu Bali,

merupakan sosok panutan dalam etika berpikir, berkata, dan berbuat. Itu memang suatu kewajiban, bahkan keharusan—mengingat proses dan persyaratan seseorang untuk menjadi *dwijati* yang begitu ketat.

Konsekuensi dari kedudukan sang *sulinggih* yang sangat sentral dan strategis, sangat dihormati, dimuliakan, dan bahkan disakralkan itu, maka setiap kali dibutuhkan oleh umat, beliau haruslah di-*tuur* (dimohon kehadirannya) terlebih dahulu, kemudian di-*pendak* (dijemput), dan disertai *pangiring*. Saat di-*tuur* itu tujuannya harus jelas, apa peran sang *sulinggih* bersangkutan dalam acara atau upacara tersebut, apakah sebagai *pamuput* upacara, memberikan *dharma wacana*, atau peran dan tujuan lain yang jelas dan pantas dengan *sesana kawikon* beliau.

Oleh karena kedudukan *sulinggih* yang demikian tinggi, bahkan istimewa, maka mungkin saja malah sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Status ke-*sulinggih*-an, misalnya, mungkin saja dipakai sebagai “jalan tol” untuk menggapai kedudukan terhormat secara instan, sehingga ada kalanya tiba-tiba menjadi sang *dwijati*—meskipun tanpa dukungan keluarga sendiri, keluarga besar, maupun desa pakraman. Oleh karena itulah maka dukungan dan pengakuan dari keluarga sendiri, keluarga besar, lalu desa pakraman, dan Parisada sebagai satu-kesatuan dukungan dan pengakuan menjadi sangat esensial, bahkan mutlak, bagi calon *dwijati* dalam tatanan masyarakat Hindu Bali.

Demikian juga halnya saat *diksa pariksa* oleh Parisada (anggotanya juga para *dwijati*), serta disaksikan oleh keluarga besar, desa pakraman, dan masyarakat luas, hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh menggali hal-hal dan syarat-syarat esensial yang secara material harus dipenuhi. Bukan malah dianggap sekadar formalitas. Ini sangat penting ditekankan, karena secara sosial adalah keharusan bagi sang *dwijati*, *pandita*, atau *sulinggih* menjadi fokus, sentral, termasuk pusat perhatian dalam setiap kegiatan, terlebih lagi pada setiap upacara keagamaan. Atas alasan inilah maka Penulis tidak sepaham bila ada calon *sulinggih* yang di-*diksa* secara massal. Setiap calon *sulinggih* sepatutnya di-*diksa* khusus hanya untuk sepasang saja, yaitu pasangan suami-istri, atau sendiri saja (apabila sudah tidak lagi atau memang tidak berpasangan). Upacaranya hendaknya didukung oleh keluarga sendiri, keluarga besar, dan desa pakraman.

Begitulah, kedudukan dan *sesana sulinggih* dalam masyarakat Hindu Bali itu mengikat sang *sulinggih* sekaligus juga mengikat masyarakat supaya menjaga sang *sulinggih* tidak lagi bebas dan sembarangan berbicara, menulis, bertindak, atau berbuat. Hal ini sungguh sangat wajar bagi setiap kedudukan terhormat dan mulia. Dari pihak *sulinggih*, hobi atau kesengan saat masih *walaka* mesti ditinggalkan. Misalnya, kesenangan jalan-jalan, potret-memotret, makan-makan, atau minum-minum, menjadi komentator di media massa, pengamat aktif, mengendarai kendaraan sendiri, dan lain-lain, walaupun ada di antaranya tidak salah, namun tetap tidak pantas atau tidak etis lagi dilaksanakan setelah menjadi *sulinggih*. Sebaliknya, pihak masyarakat pun wajib memperlakukan sang *sulinggih* sebagai

orang suci atau yang disucikan, dengan menghormati dan memuliakan para *sulinggih* sepatutnya.

Karena *sulinggih* sudah *maraga putus*, maka sang *sulinggih* hanya bisa diajari oleh sang *nabe*, dan sama sekali tidaklah patut diajari oleh sang *walaka*. *Sulinggih* merupakan kedudukan dan gelar tertinggi dalam struktur sosial penganut Hindu Bali, sehingga seseorang yang sudah di-*diksa* sebagai *sulinggih* tidaklah dibenarkan lagi mengejar gelar (kesarjanaan akademis, misalnya) maupun kedudukan duniawi lainnya.

Inilah beberapa hal penting yang patut diperhatikan oleh para *sulinggih* maupun segenap penganut Hindu Bali, agar para *sulinggih* tetap menjadi sosok sentral yang paling dihormati, dimuliakan, *mataksu*, dan disakralkan dalam kehidupan beragama.

3. *Tri Sadaka dan Sarwa Sadaka*

Sekitar tahun 1996 di Bali terjadi polemik tentang *tri sadaka* dan *sarwa sadaka*. Polemik ini telanjur terjadi, walaupun seharusnya tidak perlu terjadi. *Tri Sadaka* adalah *gegelaran sadaka* (istilah lain untuk sang *dwijati*, *wiku*, *pandita*, atau *sulinggih*) yang terdiri dari tiga *gegelaran* yang sudah menjadi pakem agama Hindu Bali dalam *muput* upacara. Ketiga *gegelaran* tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Gegelaran Siwa*, dilaksanakan oleh para *sulinggih* yang beraliran Siwa Siddhanta.
2. *Gegelaran Boddha* atau *Buddha*, dilaksanakan oleh para *sulinggih* yang beraliran Boddha.
3. *Gegelaran Bhujangga*, dilaksanakan oleh para *sulinggih* yang beraliran Bhujangga Waisnawa.

Ketiga *gegelaran* ini sangat diperlukan dalam *muput* (menyelesaikan) upacara besar, seperti upacara yang berkategori *tawur*, baik *Tawur Kasanga*, *Tawur Ngenteg Linggih*, *Tawur Panca Wali Krama*, sampai *Tawur Eka Dasa Rudra*. Upacara dengan upacara *Tawur* di Bali lazim disebut *karya*.

Puja, *stuti*, *stawa*, maupun *stotra* dan doa-doa ketiga *gegelaran* ini akan bertemu, menyatu, dan saling melengkapi dalam setiap upacara dalam tingkatan *karya*, sehingga semua tujuan mengadakan upacara besar tersebut dapat tercapai—dalam bahasa Bali lazim diistilahkan dengan “*sidha karya, labdha karya, sidha sidhaning don*”.

Adapun istilah *sarwa sadaka* baru dimunculkan sekitar tahun 1996 itu. Istilah *sarwa sadaka* ini menggambarkan seluruh (*sarwa*) *sadaka* (*dwijati*, *wiku*, *pandita*, atau *sulinggih*) yang ada, tanpa memandang *gegelaran* maupun asal klen atau *soroh*-nya. *Sarwa sadaka* mencakup pengertian semua *sulinggih* yang ada, sehingga lebih bersifat kebersamaan sosial. Istilah *sarwa sadaka* ini tidak ada kaitan dengan penyelesaian upacara.

Meskipun demikian tetap dapat ditangkap maksud baik pencetus istilah *sarwa sadaka* ini: bahwa pada saat-saat upacara besar, *tri sadaka* yang *muput* sebaiknya berasal dari

keberagaman *sulinggih* yang ada, yaitu keberagaman klen/*soroh*-nya. Istilah *tri sadaka* dalam upacara besar tidak berarti hanya terdiri dari tiga *sulinggih*, melainkan bisa melibatkan tiga, empat, lima, tujuh, sembilan, atau sebelas *sulinggih*, dan seterusnya, sesuai kebutuhan dan keadaan. Misalnya, dari sebelas *sulinggih* yang *muput*—tetap terdiri dari tiga *gegelaran tri sadaka*—bisa saja terdiri atas tujuh *sulinggih* Siwa, dua *sulinggih* Boddha, dan dua *sulinggih* Bhujangga Waisnawa.

Namun, perlu diingat bahwa menentukan (*nuur*) *sulinggih* itu ditentukan oleh sang penyelenggara *karya* (upacara). Jadi, itu terserah sepenuhnya kepada sang penyelenggara *karya* mau *nuur sulinggih* mana atau siapa dari *gegelaran tri sadaka* di antara *sarwa sadaka* yang ada.

Dengan demikian, antara *tri sadaka* dan *sarwa sadaka* memang merupakan istilah yang berbeda, mempunyai arti berbeda pula, tetapi tidak saling bertentangan. Pemilihan *tri sadaka* di antara *sarwa sadaka* dapat berjalan sejalan, tergantung kehendak sang penyelenggara upacara.

4. Nuur Lebih daripada Satu Sulinggih

Kenapa sampai perlu *nuur* lebih daripada satu *sulinggih* untuk *muput* upacara? Tidakkah itu berlebihan? Bukankah itu pemborosan? Begitu pertanyaan sering dilontarkan belakangan ini. Dalam pemahaman Penulis, hal ini perlu dijelaskan lebih mendalam supaya tidak menimbulkan salah pengertian terhadap pelaksanaan upacara Hindu Bali.

Nuur lebih daripada satu *sulinggih* untuk *muput* upacara dalam pelaksanaan upacara Hindu Bali tidaklah berlebihan, apalagi pemborosan. Tidak pula mengada-ada. Maksud dan tujuan *nuur* (mengundang) lebih daripada satu *sulinggih* dalam kegiatan upacara, terutama upacara yang berkategori besar, seperti menggunakan banten *catur*, *tawur*, itu dapat dipahami sebagai berikut.

1. Untuk memperlengkap puja-mantra (baik *tri sadaka* ataupun hanya Siwa dan Boddha).
2. Untuk kesempurnaan puja-mantra. Dalam upacara-upacara besar, supaya memperoleh kesempurnaan hasil yang diharapkan sesuai filsafat upacara tersebut, maka perlu upaya kesempurnaan puja mantra. Jangan sampai terjadi *banten* besar, upacara besar, namun kurang puja mantra. Antara besarnya upacara dan *banten* haruslah sesuai dengan puja-mantra. Karena dalam upacara-upacara besar sangat dibutuhkan puja mantra yang sangat banyak, lengkap, dan tentunya lebih lama, maka guna melengkapi kemungkinan satu *sulinggih* lupa atau salah ucap, kehadiran *sulinggih* lain sebagai penyempurna puja mantra tersebut menjadi sangat diperlukan. Dengan demikian di antara *sulinggih* yang di-*tuur* lebih daripada satu itu akan saling melengkapi puja mantra.
3. Sebagai jaminan pasti ada *sulinggih* yang *muput* dalam *gegelaran* tertentu. Ada upacara-upacara yang memang kategorinya harus di-*puput* oleh *sulinggih*. Tidak bisa

dialihkan kepada pamangku saja. Misalnya, upacara *ngaroras/mamukur*, tidak akan selesai bila tidak di-*puput* oleh selain *sulinggih*. Ini berarti upacara tersebut akan batal kalau satu-satunya *sulinggih* yang di-*tuur* pada hari H tiba-tiba saja berhalangan. Itu berarti tidak ada *sulinggih* lain lagi yang *muput*, karena tidaklah etis, bahkan tidaklah mungkin, *nuur sulinggih* secara mendadak, tanpa *nuur* sebelumnya.

Guna mengatasi kemungkinan yang tidak diinginkan itulah maka untuk upacara-upacara tertentu atau kategori besar di Bali lazim *nuur* lebih daripada satu *sulinggih*—dari satu *sulinggih* yang dipersyaratkan. Misalnya, di-*tuur*-lah dua *sulinggih* Siwa—walaupun satu *sulinggih* saja sudah cukup.

Berbeda halnya dengan upacara biasa, seperti *ngodalin*, *otonan*, dan upacara-upacara yang kategori kecil. Bila sang *sulinggih* yang di-*tuur* tiba-tiba berhalangan pada hari H, upacara bersangkutan tetap saja bisa dilangsungkan karena sang *sulinggih* bisa digantikan dengan *nunas tirta* dari beliau, atau cukup di-*antebang* oleh *pamangku*.

Tentu tidak demikian halnya dengan upacara *ngaroras/mamukur* yang mesti di-*puput* langsung oleh *sulinggih*. Tidak bisa hanya dengan *nunas tirta* dari *sulinggih*, atau dipimpin oleh *pamangku*. Upacara ini dengan sendirinya akan batal apabila sang *sulinggih* tiba-tiba berhalangan. Jadi, sungguh sangat berisiko apabila dalam upacara *ngaroras/mamukur*, misalnya, *nuur* hanya satu *sulinggih*. *Ngaroras* atau *mamukur* ini merupakan serangkaian “upacara doa”: doa oleh penyelenggara, doa oleh *bebantenan*, dan doa oleh sang *sulinggih* melalui puja mantra beliau. Karena sangat ditentukan oleh puja mantra, maka perlu upaya kesempurnaan puja mantra. Di sinilah sangat dibutuhkan *nuur* lebih daripada satu *sulinggih* dalam satu saat dan satu tempat upacara yang sama. Para *sulinggih* yang di-*tuur* untuk *muput* satu upacara bersama-sama itu akan saling melengkapi dan memperkuat puja-mantra dan doa yang di-*uncar*-kan atau dilantunkan.

HINDU ITU BERBHINEKA

Menyebut utawi mengakui Hindu Bali, Hindu Tengger utawi Jawa, Hindu Sunda Wiwitan, Hindu Kaharingan , Hindu Toraja tidak berarti mengganti apalagi menghilangkan Hindu Dharma . Hindu dengan Ciri Khas Daerah masing masing patut tetap disebut dan tetap diingat, tetapi Hindu Dharma juga tetap disebut dan diingat, itu sesuai dengan Desa Kala Patra, kapan menyebut Hindu Bali dan Kapan menyebut Hindu Dharma. Kalau kita berkumpul sesama Hindu Bali atau untuk menyebut Hindu daerah mana kita maka kita akan menyebut diri Hindu Bali. Tetapi saat kita secara Nasional atau Nusantara sedang berkumpul maka kita disana berkumpul sebagai Umat Hindu Dharma.

Sama halnya Istilah Ida Sang Hyang Widhi Waca, Allah, Tuhan Yesus, Tian, Sang Budha dsbnya tidak akan pernah mengganti atau menghilangkan sebutan Tuhan Yang Maha Esa. Sama halnya menyebut soroh soroh di Bali tidak berarti menghilangkan identitas Bali secara keseluruhan. Menyebut diri orang Papua, Ambon, Bali, Jawa, Sunda sampai Aceh, tidak berarti mengganti atau menghilangkan sebutan kita orang Indonesia. Itulah Bhineka Tunggal Ika , baik dalam Hindu, didalam Bali sendiri, dan didalam NKRI. Sehingga tidaklah masalah, karena Menyebut Hindu Bali atau Hindu Kaharingan tidak bertentangan atau menghilangkan sebutan identitas Hindu Dharma.

DESA ADAT BENTENG PERTAMA DAN TERAKHIR BALI

Agama Hindu adalah jiwanya Bali.

Budaya Bali adalah nafasnya Bali

Desa Adat adalah urat nadinya Bali

Bali – Agama Hindu – Budaya Bali – Desa Adat tidak dapat dipisahkan dan berada dalam satu kesatuan sistem —————> Semua itulah identitasnya Bali. Desa Adat adalah tiang – tiangnya atau bentengnya Bali, oleh karena itulah sebagai tiang, sebagai benteng ia harus selalu kokoh, harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan agar tidak lemah dan rapuh. Kalau Desa Adat lemah dan rapuh maka ambruklah Bali. Oleh karena itu pemberdayaan Desa Adat harus dilakukan secara berkesinambungan tak pernah berhenti. Terutama pada masa – masa sekarang ini dimana masalah – masalah besar masih menghimpit bangsa dan negara Indonesia. Juga masalah – masalah besar yang sedang mengancam Bali sebagai bagian integral dari negara Republik Indonesia.

MENGAPA DESA ADAT ITU KUAT DAN SANGAT BERPENGARUH.

1. Karena punya wawengkon (wilayah), terutama Tanah Ayahan Desa atau Tanah Karang Desa.
2. Punya Krama.
3. Punya Ikatan Tempat Suci : Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa.
4. Punya ikatan Setra.

5. Punya aturan yang berupa awig awig, dan pararem.
6. Punya atau berakibat sangsi adat bagi pelanggarnya.

ANCAMAN SAMPRADAYA ASING

PELARANGAN SAMPRADAYA ASING, BALI TIDAK ANTI BUDAYA ASING.

Pada dasarnya Aliran aliran keagamaan yang mengandung perbedaan perbedaan yang sangat mendasar (sangat berbeda) dilarang untuk disebarkan dikalangan umat yang sudah beragama. Intinya adalah untuk di Indonesia adalah Pembinaan Agama, yaitu dilakukan dari, oleh dan untuk agama dan atau kepercayaan yang sama. Kalau tatanan keagamaan sangat berbeda maka sangat dilarang untuk disebarkan. Kesalahan penyebaran inilah yang dilakukan oleh Sampradaya Sampradaya Asing tersebut. Karena yang sangat mendasar Theologinya sangat berbeda : Tidak menyembah Kawitan berarti juga tidak ada Upacara Pitra Yadnya.

Tidak percaya kepada Sang Panca Maha Butha, dan Kekuatan Butha lainnya, sehingga tidak ada Upacara Bhuta Yadnya (Caru).

Untuk menguji apakah Sampraday itu adalah Non Dresta Bali, atau bukan Hindu Bali maka kunci pertanyaannya apakah:

1. Mereka Menyembah Kawitan, Kawitan apa juga diyakini sebagai Bhatara ?? Dan melaksanakan Upacara Pitra Yadnya ??
2. Apakah Punya Merajan/ Sanggah untuk Memuja Ida Bhatara Kawitan ??
3. Apakah Rumah Ibadahnya adalah Pura yang seperti di Bali , baik di rumahnya atau secara kolektif ??
4. Apakah mereka melaksanakan masegeh dan Macaru yang sesungguhnya, dg korban suci binatang yang sungguh dikorbankan/ disembelih ??
5. Apakah mereka mengenal atau Menyembah semua Ista Dewata yang tertera dalam Weda, dan yakin bahwa Ista Dewata itu adalah Manifestasi Ida Sang Hyang Widhi ?? Apakah menyembah dg Nama Tuhan yang sama dan Ista Dewata Yang sama dengan Hindu Bali ?? Atau Hindu Dharma, atau Hindu Nusantara ??
6. Apa saja pegangan Kitab Sucinya. Apakah meyakini Catur Weda, Weda Smerti, Itihasa, Purana dan semua Pancami Weda ??

Itulah bahan pertanyaan untuk menguji apakah sebuah aliran atau Ashram tetap menganut Hindu Bali atau Hindu Dresta Bali. Kalau 1 unsur saja tidak dianutnya, maka mereka bukan Hindu Bali atau Bukan Hindu Dresta Bali. Dan mesti dilarang penyebarannya di Bali.

Hindu Bali, Hindu Kaharingan, Hindu Tengger, Jawa, Sunda Wiwitan, Toraja dsbnya adalah pembentuk Hindu Dharma atau Bagian dari Hindu Dharma atau Hindu Nusantara. Jadi, jangan dipertentangkan antara Hindu Bali , Hindu Kaharingan dsbnya dengan Istilah Hindu Dharma.

Kapan kita menyebut Hindu Bali, Hindu Kaharingan dsbnya, kapan kita menyebut Hindu Dharma atau Hindu Nusantara. Secara Nasional saat kita bergabung atau bersama sama maka kita mesti menyebut Hindu Dharma. Saat kita kumpul di Pura bersama sesama Hindu Bali, maka kita menyebut Hindu Bali.

Sama halnya dengan hubungan antara NKRI dengan pembentuk atau bagian NKRI seperti Papua, Maluku, Bali, Lombok, Jawa, Padang, Aceh dstnya.

Dalam berdebat jangan bias memperdebatkan perbedaan. Karena perbedaannya sudah jelas. Perbedaan bukanlah masalah inti dari pelanggaran sampradaya non dresta Bali. Kita menghormati perbedaan, dan kita tidak peduli apapun keyakinan aliran itu. Sampradaya yang semuanya dari India itu adalah sangat baik dan sangat luhur di India, namun pasti sangat tidak cocok untuk dikembangkan di Bali ataupun di Indonesia. Hindu Bali adalah Ciptaan Tuhan dan warisan leluhur yang adiluhung yang luhur dan sangat cocok untuk Umat Krama Bali dimanapun berada. Hindu Bali pasti juga tidak cocok dikembangkan di India, atau salah kalau dimaksudkan untuk mengganti Hindu Kaharingan, Hindu Sunda Wiwitan, Tengger, Toraja dll. Maka biarlah Kebhineka an dalam Hindu di Indonesia maupun di dunia tetap ada, terpelihara dan dijaga, karena semuanya adalah luhur dan mulia.

Yang menjadi kesalahan mereka Sampradaya non dresta Bali atau masalah mereka makanya dilarang adalah.

1. Mereka menyebarkan paham dan atau tatanan keagamaan yang sangat berbeda ditengah tengah umat yang sudah beragama .
2. Telah mendiskreditkan Agama Hindu Bali atau Dresta Bali, Adat Bali, Desa Adat di Bali , dan Upacara Hindu Bali.
3. Manipulasi buku buku agama ajaran Hindu Bali dan atau Hindu Dharma.

4. Diyakini kemudian bahwa mereka ingin mengganti Agama Hindu Bali, Budaya Bali, melenyapkan Desa Adat dari Bumi Bali. Ini yang sangat berbahaya.

Tujuan dari Pelarangan Aktifitas Sampradaya di Bali adalah :

1. Tetap terjaga etika antar agama dan atau antar keyakinan yang berbeda.
2. Untuk tetap terpeliharanya kerukunan, ketertiban, kedamaian dan keamanan di Bali.
3. Sebisa bisanya menyadarkan Krama Hindu Bali yang terpapar oleh Sampradaya Asing, untuk sadar dan kembali kepada Agama Leluhur kita yang adiluhur yaitu Agama Hindu Bali yang merupakan bagian dari Hindu Dharma. Kembali kepada Agama jatidiri Krama Umat Hindu Bali.
4. Yang sangat penting juga adalah untuk melestarikan Agama Hindu Bali untuk tetap ajeg dan dominan di Bali, karena Agama Hindu Bali adalah Jiwa Pramananya Adat, Budaya dan Lingkungan alam Bali

Bahwa kita di Bali menolak dikembangkannya Sampradaya Asing yang pasti berimplikasi kepada kelestarian Adat dan Budaya Bali yang adiluhur dan adiluhung. Itu jangan pernah diartikan sebagai anti Budaya Asing, apakah Budaya India, Budaya China ataupun Budaya Arab dllnya. Samahalnya dengan adat dan Budaya Bali yang Adiluhung di Bali, Adat dan budaya Papua adiluhung di Papua, adat dan budaya Aceh adiluhung di Aceh. Tetapi akan menjadi tidak baik bila dipaksakan untuk dikembangkan di daerah daerah lain yang sudah mempunyai adat dan budaya yang adiluhung juga. Demikian juga Budaya Asing seperti Budaya Barat, China, India, Arab dsbnya adalah adiluhung dan mulia di Negaranya, namun akan tidak baik apabila dipaksakan disebar di Bali maupun di Indonesia . Masyarakat dan Krama Bali sangat menghormati dan memuliakan semua agama dan keyakinan yang ada, sekalipun itu sangat berbeda. Juga sangat menghormati bahkan juga kagum dengan Budaya Budaya Asing. Tetapi tetap tidak mengizinkan kalau budaya budaya asing itu sengaja dsebar dan dikembangkan di Bali yang tujuannya untuk menggeser atau bahkan menggantikan Budaya dan Adat Bali yang sudah ajeg di Bali, bahkan menjadi kekaguman dunia. Jadi pelarangan Sampradaya Asing jangan pernah diplesetkan sebagai anti Budaya asing manapun. Sekali lagi perbedaan itu indah dan

adalah keniscayaan, namun tidak boleh ingin menjajah dan atau menggantikan yang satu terhadap yang lain.

Dihari mendatang.....jangan lagi ada umat hindu bali atau hindu dharma/hindu nusantara yang belajar agama hindu ke india. Karena :

1. Hindu itu bermacam macam, bhineka tunggal ika. Biarkan dengan ciri keagamaan masing masing, saling menghormati, jangan saling menyebarkan keyakinan yang berbeda tersebut dikalangan umat yang sudah beragama dengan keyakinan yang berbeda.
2. Di india agama hindu sangat berbeda dengan hindu di bali, hindu dharma, hindu nusantara. Di india semua umat masuk menjadi pemeluk sampradaya yang satu sama lain sangat berbeda, yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin mencapai seribuan.
3. Kalau belajar agama hindu ke india mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui.....pastilah harus masuk kedalam ajaran salah satu sampradaya. Sehingga begitu pulang ke bali, ke indonesia.....kebanyakan ajarannya jadi sangat berbeda. Dan celakanya ingin mengubah atau menyesuaikan hindu bali atau hindu nusantara.
4. Silahkan berkali kali ke india, itu bagus, tetapi untuk tirtayatra dan mungkin untuk perbandingan antar agama hindu bali/ nusantara dengan hindu di india.

Cara mengidentifikasi apakah mereka itu penganut sampradaya yang sangat berbeda dengan hindu bali, antara lain sebagai berikut :

1. Teliti theologinya , apakah ada keyakinan terhadap tuhan yang maha esa, semua ista dewata, kawitan/ leluhur, bhuta/panca maha bhuta ??
2. Teliti sembahnya :
Apakah menyembah tuhan yang maha esa, ista dewata, kawitan, sembah kepada bhuta , bahkan menyembah orang tua yang masih hidup ??
3. Teliti upacara yadnyanya : apakah ada dewa yadnya, pitra yadnya, rsi yadnya, manusia yadnya dan bhuta yadnya.
Bhuta yadnya dengan sungguh menjadikan hewan yang telah ditentukan sebagai korban suci yang yang sungguh disembelih sebagai korban suci yang telah disucikan terlebih

dahulu. Juga bhuta yadnya yang meyakini tuak, arak, brem, bawang, jahe sebagai sarana bhuta yadnya ??

4. Apakah mereka memakai sulinggih yang jelas upacara diksa dan gegelarnya sesuai sulinggih hindu bali atau nusantara ??
5. Apakah pegangan kitab sucinya adalah catur weda, weda smerti, purana , bhagawadgita yang benar, dan lontar lontar, juga dresta atmanastuti ??
6. Teliti pandangan mereka terhadap tuhan sebagai parama atman, atma tatwatma disatu sisi dan atma disisi yang lain. Bagaimana perjalanan atman setelah meninggalkan badan kasar ? Apakah mereka mengenal surga pitara loka, dewa loka, tri purusha loka dan padmasana loka (amor ing acintya) ??
7. Disetiap upacara yadnya hindu bali pasti terdapat upacara dewa yadnya, bhuta yadnya dan manusa yadnya. Konsep dewa ya bhuta ya. Apakah mereka menganut itu , meyakini itu ??

Satu saja syarat tidak dipenuhi maka.....patut digolongkan tidak hindu bali. Dan jangan coba coba menyebarkan ajarannya di kalangan krama bali yang notabena adalah hindu bali. Majelis desa adat, desa adat dan segenap krama bali pasti bergerak mempertahankan keajegan bali.

NEGARA KESATUAN, PANCASILA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Negara Kesatuan, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah **kontrak sosial** berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebuah perjanjian sebelum didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau saja sebelum 17 Agustus 1945 tidak terdapat kesepakatan tentang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan pernah terwujud. Wilayah Indonesia ini mungkin akan terdiri dari lebih 20 negara yang terpisah dan berdaulat dan bercirikan masing – masing suku bangsanya, budayanya, agamanya dan adat istiadatnya. Esensi dari Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai kontrak sosial adalah setiap daerah berkewajiban mendukung tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pembangunan bangsa. Sedang dilain pihak Negara (Pemerintah) berkewajiban untuk mengayomi, melindungi dan mensejahterakan daerah –daerah. Mengayomi dan melindungi setiap **local genius**, agamanya, budaya, adat istiadat yang secara

historis telah menjadi tuan di daerahnya, jangan sampai terdesak atau terpinggirkan oleh pergeseran demografi atau pembangunan – pembangunan yang salah arah (jangan sampai terjadi **cultural shock**). Hal ini penting untuk ditaati agar Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai perjanjian dasar antara kita tidak hilang ciri – cirinya hanya karena bertameng **globalisasi**. Kalau Pancasila dan Bhineka Tunngal Ika yang mempersatukan bangsa kita yang menjadi perjanjian kita, secara signifikan tidak lagi dihormati atau bahkan diubah, maka perjanjian berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun batal dan daerah – daerah akan mempunyai hak untuk kembali kepada keadaan sebelum 17 Agustus 1945.

Oleh karena demikian marilah kita pelihara dan hormati setiap daerah di Indonesia ini dengan ciri agamanya, budayanya dan adat istiadatnya. Jangan coba – coba ada keinginan yang besar menghegemoni yang kecil apalagi yang lebih kecil ingin menghegemoni yang besar. Bagi para pendatang dimanapun didaerah di Indonesia hendaknya selalu memahami dan melaksanakan pepatah Minang yang telah menjadi pepatah umum ber sama yaitu **dimana bumi dipijak disana langit dijunjung**, demi kehidupan yang sejahtera dan harmonis berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

MASALAH – MASALAH BESAR YANG DIHADAPI BALI

1. Global

- a. Era global : informasi, komunikasi, gaya hidup, budaya global dan sindikat kejahatan.
- b. Pasar bebas
- c. Sikap pragmatis hedonis / menghalalkan segala cara.
- d. Terorisme internasional.

2. Nasional.

- a. Desakan / tekanan ekstrim kanan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara
- b. Berbagai krisis yang melanda bangsa Indonesia
- c. Luntturnya Nasionalisme
- d. Sistem politik, sistem hukum dan perundang – undangan nasional
- e. Sindikat kejahatan.

- f. Undang – undang Otonomi Daerah dan Undang – undang tentang perimbangan keuangan Pusat & Daerah
- g. Provokator

3. Lokal (Bali)

- a. Sampradaya Asing
- b. SDM yang lemah
- c. Desakan penduduk pendatang
- d. Terlanjur menggantungkan diri pada pariwisata
- e. Ketergusuran budaya, degradasi budaya dan terancamnya kehidupan beragama Hindu di Bali.
- f. Tanah – tanah agraris terus semakin berkurang (± 1000 ha / tahun) dan terus berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Bali tidak mampu lagi berswasembada pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
- g. Bali “ over loaded “ : pembangunan fisik yang terus dan terlalu meningkat tanpa kontrol yang memadai. Sungai, danau, laut tercemar, sawah tergusur menuju arah kepunahan subak, hutan menyusut dan gundul.
- h. Kemacetan lalu lintas di kota Denpasar
- i. Kantibmas terancam tidak kondusif
- j. Pariwisata terancam.
- k. Demokrasi pengerahan massa.
- l. Ditingkat basis massa cenderung tidak intelek dan sering kali memperlihatkan fanatisme membabi – buta, sehingga pertentangan ditingkat elit politik sering kali berpengaruh sangat buruk ditingkat basis massa.
- m. Provokator

CURICULUM VITAE

Nama : Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet
Nama Sebelum Pembedaan : Ida Idewa Gede Ngurah Swastha, SH
Jabatan : - Pangelingsir Agung Ksatria Dalem Treh Ida Idewa Sumretha
: - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali
: - Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia
: - President Apenindo (Indonesia Aviation Expert)
: - Bendesa Agung Majelis Desa Adat - Bali

Aktivitas Sosial :

Pemerhati masalah Hukum, Politik, Penerbangan, Agama dan Sosial Budaya.

Sebagai Pembicara pada berbagai Seminar.

Alamat : - Puri Den Bencingah, Jalan Pulau Adi 51, Denpasar 80114 - Bali - Indonesia
: - Puri Den Bencingah, Jalan Raya Besakih No.16, Semarapura - Bali - Indonesia

Organisasi Sosial :

1. Ketua Umum Himpunan "Air Traffic Controller" Indonesia (HATCI) 1989-1994.
2. Ketua Umum Forum Pemerhati Hindu Dharma Pusat 1994-2002 (Dua periode).
3. Anggota Litbang Parisada Hindu Dharma Pusat 1996 – 2001
4. Anggota Lembaga Pengkajian Budaya Bali / Society for Balinese Studies (SBS) 1994 – 1998)
5. Ketua Tim Seleksi Calon KPU Bali 2003.
6. Anggota Badan Koordinasi Pengamanan Bali (BKPB) tahun 2006
7. Nayaka Majelis Utama Desa Pekraman Bali Periode 2004-2009.
8. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Sejak 1997
9. Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Sejak 2008
10. Ketua Tim Seleksi Calon KPU Bali 2008
11. Petajuh Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Sejak 2009
12. Pendiri Yayasan Watuenggong (The Watuenggong Foundation)
13. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali sejak 2014
14. Pangelingsir Agung Ksatria Dalem Treh Ida Idewa Sumretha
15. Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia Sejak 12 juni 2016
16. President Apenindo (Indonesia Aviation Expert)
17. Ketua Umum Asosiasi Ground Handling Indonesia (AGHI)
18. Bendesa Agung Majelis Desa Adat - Bali

Penghargaan :

- Memperoleh Lempad Prize dari Sanggar Dewata Indonesia 1998.
- Penghargaan Tokoh Kerukunan dari Kapolda Bali 2019

Denpasar, 07 Agustus 2019



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet